

INTERNALISASI NILAI-NILAI ANTIKORUPSI MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MEMBENTUK INTEGRITAS PESERTA DIDIK: STUDI KASUS DI SMA NEGERI 1 TAKENGON

Andi Yacub¹, Cut Khairani^{2*}, Najmuddin³, Muhammad Iqbal³

^{1,2,4} Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Almuslim, Aceh, Indonesia

³ Program Studi Magister Pendidikan Dasar, Universitas Almuslim, Aceh, Indonesia

*Corresponding author: cutkhairani@umuslim.ac.id

Abstrak

Korupsi masih menjadi tantangan yang memengaruhi penguatan integritas dalam dunia pendidikan sehingga diperlukan pendidikan antikorupsi yang berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan karakter dalam membentuk integritas peserta didik di SMA Negeri 1 Takengon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai tidak hanya berlangsung melalui pembelajaran di kelas, tetapi berkembang melalui interaksi antara budaya sekolah, keteladanan guru, tata kelola sekolah, pengalaman sosial peserta didik, serta dukungan keluarga. Nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kesederhanaan, dan keberanian diinternalisasikan melalui pembiasaan yang berkelanjutan, kesempatan menjalankan amanah, pengambilan keputusan, serta penerapan aturan sekolah secara konsisten. Pengalaman tersebut membentuk integritas peserta didik sehingga nilai-nilai antikorupsi tidak berhenti pada ranah pengetahuan, tetapi tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Penelitian ini memperlihatkan bahwa penguatan pendidikan antikorupsi memerlukan ekosistem pendidikan yang mengintegrasikan pembelajaran, budaya sekolah, tata kelola kelembagaan, dan kolaborasi dengan keluarga sebagai fondasi pembentukan karakter antikorupsi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pendidikan Antikorupsi, Pendidikan Karakter, Integritas, Internalisasi Nilai

Abstract

Corruption remains a persistent challenge that undermines integrity within educational environments, highlighting the need for character-based anti-corruption education from an early stage. This study aims to analyze the internalization of anti-corruption values through character education in shaping students' integrity at SMA Negeri 1 Takengon. The findings indicate that the internalization process extends beyond classroom instruction and develops through the interaction of learning activities, school culture, teacher role modelling, institutional governance, students' social experiences, and family support. The values of honesty, justice, responsibility, simplicity, and courage are strengthened through continuous habituation, collaborative learning, decision-making opportunities, and the consistent implementation of school norms. These interconnected experiences transform anti-corruption values from conceptual understanding into everyday practices reflected in students' attitudes and behaviors. The study further demonstrates that effective anti-corruption character education requires an educational ecosystem in which pedagogical practices, organizational culture, and stakeholder collaboration reinforce one another. This perspective contributes to the development of anti-corruption character education by emphasizing that integrity is cultivated through sustained educational experiences rather than through the transmission of moral knowledge alone.

Keywords: Anti-Corruption Education, Character Education, Integrity, Value Internalization

1. PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi salah satu tantangan utama yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor ekonomi dan politik, tetapi juga memengaruhi kualitas penyelenggaraan

pendidikan melalui melemahnya budaya kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Jariyah et al. (2025) menjelaskan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan strategi preventif yang berperan dalam membangun kesadaran antikorupsi melalui proses pendidikan, sedangkan Salam et al. (2024) menegaskan bahwa penguatan pendidikan karakter menjadi bagian penting dari kebijakan antikorupsi di Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan memiliki posisi strategis dalam membentuk generasi yang berintegritas dan mampu menolak berbagai bentuk perilaku koruptif sejak dini.

Pendidikan antikorupsi berkembang sebagai bagian integral dari pendidikan karakter yang berorientasi pada pembentukan nilai, sikap, dan perilaku peserta didik. Menurut Nurudin et al. (2023), nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian perlu diinternalisasikan secara berkelanjutan melalui proses pendidikan agar menjadi bagian dari karakter peserta didik. Sejalan dengan itu, Zulaiha et al. (2025) membuktikan bahwa pendidikan karakter antikorupsi berkontribusi terhadap penguatan integritas pendidikan, sedangkan Gusnata et al. (2025) menunjukkan bahwa implementasi program pendidikan karakter antikorupsi mampu meningkatkan sikap dan perilaku antikoruptif peserta didik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter yang tercermin dalam perilaku sehari-hari.

Implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah semakin diarahkan pada integrasi nilai-nilai integritas ke dalam kurikulum, proses pembelajaran, dan budaya sekolah. Al Ghifari et al. (2026) menjelaskan bahwa efektivitas implementasi pendidikan antikorupsi dipengaruhi oleh keselarasan kurikulum, strategi pembelajaran, serta dukungan kelembagaan sekolah, sedangkan Suyitno et al. (2026) menegaskan pentingnya materi pembelajaran dan sistem evaluasi dalam memperkuat integritas peserta didik. Hasil penelitian Santoso et al. (2024) turut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan antikorupsi dipengaruhi oleh kemampuan sekolah menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya budaya integritas secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan antikorupsi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh kemampuan sekolah menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam seluruh aktivitas pendidikan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi telah dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti integrasi ke dalam kurikulum, penguatan budaya sekolah, pembelajaran berbasis nilai, hingga pendidikan kewarganegaraan. Wahyuni et al. (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pendidikan antikorupsi dipengaruhi oleh keteladanan guru dan pembiasaan perilaku positif di lingkungan sekolah. Rohidussyafiq (2026) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam menanamkan karakter antikorupsi, sedangkan Ruhadi dan Uddin (2025) menempatkan penguatan etika Pancasila sebagai landasan pembentukan budaya antikorupsi. Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut masih lebih banyak berfokus pada efektivitas program, penguatan kurikulum, atau peran mata pelajaran tertentu. Kajian yang secara komprehensif menjelaskan bagaimana nilai-nilai antikorupsi diinternalisasikan melalui interaksi antara proses pembelajaran, budaya sekolah, dan keteladanan guru dalam membentuk integritas peserta didik masih relatif terbatas.

Penelitian pada konteks internasional juga menunjukkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi dipengaruhi oleh karakteristik sistem pendidikan dan budaya masing-masing negara. Pratama & Siregar (2026) mengungkap bahwa efektivitas pendidikan antikorupsi sangat dipengaruhi oleh kesesuaian kurikulum dengan konteks sosial dan budaya, sedangkan Sakban et al. (2025) menekankan pentingnya penanaman nilai kejujuran dan kesederhanaan sejak dini sebagai fondasi pembentukan karakter antikorupsi. Temuan-temuan

tersebut menunjukkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi tidak dapat dipahami hanya dari aspek kurikulum atau kebijakan, tetapi juga perlu dikaji berdasarkan konteks sekolah, budaya organisasi, serta praktik keseharian yang membentuk proses internalisasi nilai pada peserta didik. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk menjelaskan mekanisme internalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam lingkungan sekolah secara lebih mendalam.

SMA Negeri 1 Takengon merupakan salah satu sekolah yang telah mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam berbagai aktivitas pendidikan melalui pembelajaran, budaya sekolah, dan program pembiasaan sejak tahun 2019. Berdasarkan hasil observasi awal, nilai-nilai antikorupsi tidak hanya diperkenalkan melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga diwujudkan dalam praktik keseharian melalui pembiasaan perilaku jujur, tanggung jawab, disiplin, kesederhanaan, serta keberanian menyampaikan kebenaran yang didukung oleh keteladanan guru, kebijakan sekolah, dan berbagai aktivitas pembinaan peserta didik. Selain itu, berbagai bentuk keterlibatan peserta didik dalam organisasi sekolah, pengelolaan tugas, serta kerja sama antara sekolah dan orang tua menunjukkan bahwa proses pembentukan integritas berlangsung melalui pengalaman belajar yang terintegrasi dalam kehidupan sekolah. Kondisi tersebut menjadikan SMA Negeri 1 Takengon sebagai konteks yang relevan untuk mengkaji secara lebih mendalam mekanisme internalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam pembentukan integritas peserta didik.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, studi ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan memusatkan perhatian pada mekanisme internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan karakter dalam membentuk integritas peserta didik di sekolah menengah atas. Kebaruan penelitian tidak hanya terletak pada konteks penelitian di SMA Negeri 1 Takengon, tetapi juga pada analisis mengenai bagaimana pembelajaran, budaya sekolah, keteladanan guru, tata kelola sekolah, serta pengalaman peserta didik dalam menjalankan berbagai amanah saling berinteraksi membentuk karakter antikorupsi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan implementasi nilai-nilai antikorupsi sebagai bagian dari program pendidikan karakter, tetapi juga menunjukkan bahwa internalisasi nilai berlangsung melalui ekosistem pendidikan yang melibatkan interaksi antara kebijakan sekolah, praktik pembelajaran, pengalaman sosial peserta didik, dan dukungan lingkungan pendidikan secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan karakter dalam membentuk integritas peserta didik di SMA Negeri 1 Takengon. Analisis difokuskan pada implementasi nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kesederhanaan, dan keberanian melalui pembelajaran, budaya sekolah, keteladanan guru, serta berbagai praktik kelembagaan yang mendukung pembentukan karakter antikorupsi. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan model implementasi pendidikan karakter antikorupsi yang menempatkan pembelajaran, budaya sekolah, tata kelola kelembagaan, dan pengalaman belajar peserta didik sebagai satu kesatuan dalam membangun budaya integritas di sekolah, sekaligus menjadi referensi praktis bagi sekolah dalam memperkuat pendidikan antikorupsi secara berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan karakter dalam membentuk integritas peserta didik di SMA Negeri 1

Takengon. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara holistik berdasarkan pengalaman, perspektif, dan praktik yang berlangsung secara alamiah di lingkungan sekolah, sedangkan desain studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi suatu fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi pendidikan antikorupsi pada konteks tertentu.

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Takengon, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena sekolah tersebut telah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter sejak tahun 2019 melalui integrasi pembelajaran, program pembiasaan, serta budaya sekolah yang berorientasi pada pembentukan integritas peserta didik. Penelitian berlangsung selama empat bulan, yaitu Januari–April 2024, sehingga peneliti memiliki kesempatan melakukan pengamatan secara langsung terhadap berbagai aktivitas sekolah yang berkaitan dengan implementasi pendidikan antikorupsi.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan tingkat keterlibatan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pendidikan antikorupsi di sekolah. Informan penelitian berjumlah 21 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan mereka dalam implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah. Informan terdiri atas satu kepala sekolah, empat wakil kepala sekolah yang membidangi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, serta hubungan masyarakat, dua wali kelas, masing-masing satu guru Pendidikan Pancasila, guru Pendidikan Agama, guru sejarah, dan guru IPAS, serta sepuluh peserta didik. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen sekolah, seperti program pendidikan karakter, tata tertib sekolah, dokumen pembelajaran, laporan kegiatan, serta dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi pendidikan antikorupsi.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung implementasi nilai-nilai antikorupsi dalam proses pembelajaran, budaya sekolah, dan aktivitas keseharian warga sekolah. Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan praktik para informan terhadap implementasi pendidikan antikorupsi. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi serta memverifikasi data hasil observasi dan wawancara melalui berbagai dokumen yang relevan.

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Tahap reduksi dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, melakukan proses pengodean (coding), serta memfokuskan data sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang disusun berdasarkan tema-tema implementasi nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kesederhanaan, dan keberanian. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan secara terus-menerus disertai proses verifikasi terhadap seluruh temuan hingga diperoleh pola yang konsisten mengenai mekanisme internalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam pembentukan integritas peserta didik.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan melalui pencocokan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, penelitian ini menerapkan kriteria trustworthiness yang meliputi credibility, transferability, dependability, dan confirmability untuk memastikan bahwa seluruh

proses penelitian dilaksanakan secara sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter antikorupsi di SMA Negeri 1 Takengon telah dilaksanakan melalui berbagai aktivitas pembelajaran, pembiasaan, dan budaya sekolah yang saling mendukung dalam membentuk integritas peserta didik. Berdasarkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, implementasi tersebut tidak hanya berorientasi pada penyampaian pengetahuan mengenai antikorupsi, tetapi juga diarahkan pada proses internalisasi nilai-nilai karakter melalui pengalaman belajar, interaksi antara guru dan peserta didik, serta berbagai program sekolah yang mendorong terbentuknya perilaku antikoruptif. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pendidikan antikorupsi di sekolah telah diintegrasikan ke dalam kehidupan akademik maupun kehidupan sosial peserta didik sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter.

Berdasarkan fokus penelitian, implementasi pendidikan karakter antikorupsi dianalisis melalui lima nilai utama, yaitu kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kesederhanaan, dan keberanian. Kelima nilai tersebut merupakan dimensi yang saling berkaitan dalam membangun integritas peserta didik dan diwujudkan melalui proses pembelajaran, keteladanan guru, serta budaya sekolah yang berkembang di SMA Negeri 1 Takengon. Uraian pada setiap bagian berikut menyajikan hasil temuan lapangan sekaligus pembahasannya untuk menjelaskan bagaimana masing-masing nilai diinternalisasikan dalam kehidupan sekolah.

Implementasi Nilai Kejujuran dalam Pembelajaran dan Kehidupan Sehari-hari

Hasil observasi menunjukkan bahwa implementasi nilai kejujuran di SMA Negeri 1 Takengon dilakukan melalui kegiatan pembelajaran maupun pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Pada kegiatan pembelajaran, guru mengintegrasikan nilai kejujuran melalui diskusi kelas, proyek kelompok, serta pelaksanaan tugas dan ujian yang dikerjakan secara mandiri tanpa menyontek. Selain itu, peserta didik dibiasakan menyampaikan pendapat berdasarkan pemahaman sendiri, mencantumkan sumber informasi secara benar, serta bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang dibuat. Di luar kegiatan pembelajaran, pembiasaan nilai kejujuran terlihat dalam kegiatan ekstrakurikuler, organisasi siswa, dan program *Kelas Kejujuran* yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktikkan perilaku jujur dalam berbagai aktivitas sekolah. Meskipun demikian, hasil observasi juga menunjukkan bahwa penerapan nilai kejujuran di luar kelas masih menghadapi hambatan berupa tekanan kompetisi akademik, norma kelompok, dan pengaruh media sosial yang memengaruhi konsistensi perilaku peserta didik. Data observasi juga menunjukkan adanya peningkatan perilaku jujur sebesar 25% selama satu semester setelah berbagai program pembiasaan diterapkan di sekolah.

Hasil wawancara dengan berbagai informan menunjukkan bahwa implementasi karakter kejujuran dipandang sebagai tanggung jawab seluruh warga sekolah. Kepala sekolah menyampaikan bahwa pendidikan kejujuran tidak cukup dilaksanakan melalui kegiatan akademik, tetapi harus diperkuat melalui kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat agar peserta didik mampu menerapkan nilai kejujuran secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan pandangan tersebut, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum menjelaskan bahwa internalisasi nilai kejujuran telah diintegrasikan sejak tahap perencanaan pembelajaran melalui penyusunan perangkat ajar, pelaksanaan asesmen, dan berbagai aktivitas belajar yang mendorong peserta didik mengerjakan tugas secara mandiri, menyampaikan gagasan berdasarkan pemahaman sendiri, serta menghargai keaslian karya. Guru Pendidikan

Pancasila, wali kelas, dan guru mata pelajaran lainnya juga mengungkapkan bahwa diskusi kelas, proyek kelompok, dan pembelajaran kooperatif menjadi strategi yang efektif dalam membangun integritas akademik karena mampu menumbuhkan rasa saling percaya, tanggung jawab, dan kesadaran moral peserta didik.

Meskipun demikian, para informan mengakui bahwa penerapan nilai kejujuran masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat tekanan kompetisi akademik, pengaruh media sosial, dan norma kelompok yang dapat memengaruhi konsistensi perilaku peserta didik di luar kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, beberapa informan menekankan pentingnya evaluasi perilaku secara berkala, simulasi etis, serta penguatan kerja sama antara sekolah dan orang tua melalui berbagai kegiatan pembinaan. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam memperkuat implementasi karakter kejujuran. Beberapa guru mengungkapkan bahwa peserta didik sering menghadapi dilema etis di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga pembiasaan yang dilakukan di sekolah perlu didukung oleh pendidikan karakter di rumah. Salah seorang informan menyatakan, "*Penerapan karakter kejujuran sangat dipengaruhi oleh dukungan keluarga, di mana siswa sering menghadapi dilema etis di rumah seperti mengakui kesalahan. Workshop kolaborasi sekolah-orang tua dapat memperkuat nilai ini, memastikan siswa jujur tidak hanya di sekolah tetapi juga di masyarakat.*" Informan lain juga menegaskan bahwa penguatan melalui modul interaktif, simulasi etis, dan workshop bersama orang tua diperlukan agar peserta didik mampu mempertahankan sikap jujur ketika menghadapi tekanan sosial maupun pengaruh media digital.

Hasil dokumentasi memperkuat temuan observasi dan wawancara. Dokumen sekolah menunjukkan bahwa nilai kejujuran telah diintegrasikan ke dalam tata tertib sekolah, program pendidikan karakter, kegiatan ekstrakurikuler, serta berbagai program pembiasaan yang berorientasi pada pembentukan integritas peserta didik. Dokumentasi hasil survei terhadap sepuluh peserta didik menunjukkan bahwa 70% responden menyatakan nilai kejujuran ditekankan dalam kegiatan akademik, terutama pada pelaksanaan ujian dan penyelesaian tugas secara mandiri. Namun, hanya 40% responden yang menilai bahwa penerapan nilai kejujuran berlangsung secara konsisten dalam interaksi di luar kelas karena masih dipengaruhi tekanan kelompok dan kurangnya pengawasan. Dokumentasi juga menunjukkan bahwa sekitar 60% peserta didik mengakui nilai kejujuran yang ditanamkan dalam keluarga memberikan pengaruh positif terhadap penerapan perilaku jujur di sekolah. Berbagai dokumen tersebut memperlihatkan bahwa implementasi karakter kejujuran telah menjadi bagian dari proses pembelajaran maupun budaya sekolah, meskipun masih memerlukan penguatan agar penerapannya berlangsung secara konsisten dalam berbagai situasi.

Implementasi nilai kejujuran yang ditemukan pada penelitian ini memperlihatkan bahwa proses internalisasi karakter antikorupsi berlangsung melalui mekanisme yang berlapis. Kejujuran tidak dibangun hanya melalui penyampaian materi dalam pembelajaran, tetapi berkembang melalui pengalaman peserta didik ketika berinteraksi dengan guru, teman sebaya, aturan sekolah, serta berbagai bentuk pembiasaan yang diterapkan secara konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan karakter antikorupsi lebih ditentukan oleh keberlangsungan pengalaman belajar yang dialami peserta didik dibandingkan dengan intensitas penyampaian materi mengenai antikorupsi. Dengan kata lain, kejujuran berkembang sebagai budaya yang dipraktikkan secara terus-menerus sehingga menjadi bagian dari perilaku sehari-hari peserta didik.

Proses tersebut dapat dijelaskan melalui teori pendidikan karakter yang menegaskan bahwa pembentukan karakter berlangsung melalui keterkaitan antara *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action* (Annisa & Ismail, 2024; Alfari dkk., 2026; Tode dkk., 2025). Pada

penelitian ini, ketiga komponen tersebut tampak saling menguatkan. Pembelajaran memberikan pemahaman mengenai makna kejujuran sebagai nilai antikorupsi, sedangkan pembiasaan dan keteladanan guru membentuk kesadaran moral peserta didik untuk menghargai nilai tersebut. Kesadaran tersebut selanjutnya diwujudkan dalam tindakan nyata melalui pelaksanaan tugas, ujian, maupun aktivitas organisasi sekolah yang menuntut tanggung jawab dan kejujuran. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai kejujuran berlangsung sebagai proses pembelajaran sosial yang berkesinambungan, bukan sebagai perubahan perilaku yang terjadi secara instan.

Dari perspektif implementasi kebijakan, keberhasilan pembentukan nilai kejujuran juga menunjukkan adanya keterkaitan antara komunikasi kebijakan, komitmen pelaksana, dan budaya organisasi (Yusuf dkk., 2024; Ningtyas dkk., 2025). Sekolah tidak hanya menyampaikan pentingnya kejujuran melalui kegiatan pembelajaran, tetapi juga mengintegrasikan nilai tersebut ke dalam tata tertib, program pembiasaan, serta berbagai aktivitas sekolah. Konsistensi guru dalam memberikan teladan memperkuat implementasi kebijakan tersebut sehingga peserta didik memperoleh pengalaman yang sama baik di dalam maupun di luar kelas (Rahma dkk., 2025; Ernawati dkk., 2025). Dengan demikian, implementasi pendidikan antikorupsi pada penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas suatu program tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada kemampuan sekolah membangun lingkungan yang secara konsisten merepresentasikan nilai-nilai yang diajarkan.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Nurwahyuni dkk., (2026) dan Hamik dkk (2026) yang menempatkan keteladanan guru dan pembiasaan sebagai faktor penting dalam pendidikan antikorupsi. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut belum sepenuhnya menjelaskan keberhasilan internalisasi nilai kejujuran. Data penelitian memperlihatkan bahwa dukungan keluarga turut menentukan konsistensi perilaku peserta didik ketika berada di luar lingkungan sekolah. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan antikorupsi tidak cukup dipahami sebagai hasil implementasi program sekolah semata, tetapi merupakan hasil interaksi antara pembelajaran, budaya sekolah, keteladanan guru, dan penguatan nilai di lingkungan keluarga. Temuan ini memberikan perspektif bahwa proses internalisasi nilai kejujuran berlangsung dalam suatu ekosistem pendidikan yang saling berkaitan, sehingga keberlanjutan pembentukan karakter antikorupsi memerlukan sinergi antara sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial peserta didik.

Implementasi Nilai Keadilan dalam Interaksi antara Guru, Peserta Didik, dan Warga Sekolah

Prinsip keadilan di SMA Negeri 1 Takengon tercermin dalam berbagai praktik penyelenggaraan pembelajaran maupun kehidupan sekolah yang menempatkan seluruh peserta didik pada posisi yang setara. Selama proses observasi, tidak ditemukan adanya perlakuan yang membedakan peserta didik berdasarkan latar belakang sosial, kemampuan akademik, maupun keaktifan di kelas. Guru memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik untuk bertanya, mengemukakan pendapat, mengikuti diskusi, serta memperoleh umpan balik terhadap hasil belajarnya. Dalam kegiatan kelompok, pembagian tugas dilakukan secara proporsional dan penyelesaian perbedaan pendapat diarahkan melalui musyawarah sehingga setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa nilai keadilan tidak hanya menjadi bagian dari aturan sekolah, tetapi juga hadir dalam pola interaksi sehari-hari antarwarga sekolah.

Penguatan nilai keadilan juga tergambar dari pandangan para informan mengenai pentingnya perlakuan yang objektif dalam seluruh aktivitas sekolah. Kepala sekolah

menjelaskan bahwa keadilan tidak dimaknai sebatas pemberian hak yang sama kepada seluruh peserta didik, tetapi juga diwujudkan melalui pengambilan keputusan yang transparan, penyelesaian konflik secara musyawarah, serta pemberian kesempatan yang setara bagi setiap peserta didik untuk berkembang. Sejalan dengan pandangan tersebut, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan mengungkapkan bahwa setiap program pembinaan peserta didik disusun dengan mengedepankan prinsip kesetaraan sehingga seluruh siswa memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan akademik maupun nonakademik. Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan kedisiplinan dilakukan melalui pendekatan dialogis dan musyawarah agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat adil, tetapi juga mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan saling menghargai di antara peserta didik.

Guru Pendidikan Agama menjelaskan bahwa nilai keadilan merupakan bagian dari pembentukan akhlak yang harus dibiasakan dalam kehidupan sekolah melalui sikap menghargai hak orang lain, berlaku objektif, dan menghindari perlakuan yang diskriminatif. Salah seorang guru juga menyampaikan, *"Guru harus mampu bersikap objektif dalam memberikan penilaian maupun pembinaan kepada seluruh siswa sehingga tidak muncul anggapan adanya perlakuan yang berbeda."* Informan lainnya menambahkan bahwa pembiasaan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan antarpeserta didik membantu mereka memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan sebelum suatu keputusan ditetapkan. Para guru menilai bahwa pengalaman tersebut memberikan pembelajaran nyata mengenai pentingnya keadilan sebagai landasan dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di lingkungan sekolah.

Perspektif yang sama juga muncul dari peserta didik. Mereka mengungkapkan bahwa guru berusaha menerapkan aturan secara konsisten kepada seluruh siswa tanpa membedakan status maupun prestasi akademik. Kesempatan mengikuti kegiatan sekolah, memperoleh pembinaan, maupun menyampaikan pendapat diberikan secara terbuka sehingga peserta didik merasa diperlakukan secara adil. Menurut salah seorang peserta didik, *"Kalau ada masalah, biasanya guru mengajak kami berdiskusi terlebih dahulu sehingga semua bisa menjelaskan pendapatnya sebelum keputusan diambil."* Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa peserta didik tidak hanya memahami konsep keadilan sebagai materi pembelajaran, tetapi juga merasakan penerapannya dalam praktik kehidupan sekolah sehari-hari melalui interaksi yang terbuka, penghargaan terhadap pendapat, dan perlakuan yang setara dari seluruh warga sekolah.

Dokumen sekolah memperkuat temuan tersebut melalui berbagai kebijakan yang mengakomodasi prinsip kesetaraan dan objektivitas. Tata tertib sekolah, pedoman pelaksanaan organisasi peserta didik, serta program pendidikan karakter menunjukkan bahwa nilai keadilan diintegrasikan ke dalam mekanisme pembagian tugas, pelaksanaan kegiatan organisasi, pemberian penghargaan, maupun penyelesaian pelanggaran disiplin. Dokumentasi kegiatan sekolah juga memperlihatkan bahwa proses musyawarah menjadi pendekatan yang digunakan dalam berbagai kegiatan kesiswaan maupun pembelajaran, sehingga penerapan nilai keadilan berlangsung secara konsisten dalam aktivitas akademik dan nonakademik.

Proses internalisasi nilai keadilan yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman peserta didik terhadap perlakuan yang adil memiliki peran lebih besar dibandingkan penyampaian konsep keadilan secara teoritis. Kesempatan yang sama dalam mengikuti pembelajaran, objektivitas guru dalam memberikan penilaian, serta penggunaan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan memberikan ruang bagi peserta didik untuk memahami alasan di balik suatu keputusan sekaligus menghargai hak orang lain (Hadiamsyah & Nur, 2026; Kanafu, 2026). Perspektif tersebut selaras dengan pandangan yang menempatkan perkembangan moral sebagai proses penalaran terhadap prinsip-prinsip keadilan

(Ibda, 2023). Pada konteks penelitian ini, penalaran moral berkembang melalui pengalaman sosial yang berulang sehingga peserta didik tidak hanya mematuhi aturan sekolah, tetapi juga memahami mengapa perlakuan yang adil menjadi fondasi penting dalam kehidupan bersama.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Permadani & Setiyono, (2025) yang menunjukkan bahwa budaya sekolah dan keteladanan guru merupakan faktor penting dalam keberhasilan pendidikan antikorupsi. Demikian pula, Ruhadi dan Uddin (2025) menegaskan bahwa penguatan etika Pancasila menjadi landasan dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan pendidikan. Akan tetapi, hasil penelitian ini memberikan perspektif yang lebih luas. Nilai keadilan tidak hanya dibentuk melalui keteladanan guru ataupun penguatan nilai dalam pembelajaran, tetapi juga berkembang melalui mekanisme kelembagaan, seperti penerapan aturan yang konsisten, pengambilan keputusan yang transparan, pembagian kesempatan yang setara, dan penyelesaian konflik melalui musyawarah. Dengan demikian, keadilan dipraktikkan sebagai budaya organisasi sekolah yang dialami secara langsung oleh peserta didik dalam setiap aktivitas pendidikan.

Perspektif tersebut sekaligus memperlihatkan kontribusi penelitian ini terhadap kajian pendidikan karakter antikorupsi. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menempatkan pendidikan antikorupsi pada aspek kurikulum, strategi pembelajaran, atau penguatan nilai karakter melalui mata pelajaran tertentu. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai keadilan berlangsung melalui interaksi yang berkesinambungan antara pembelajaran, budaya sekolah, tata kelola kelembagaan, dan hubungan sosial antarsesama warga sekolah. Temuan ini memperkuat pandangan (Balesta, 2025; Khoiriya, 2026; Al-farroz, 2026) bahwa pencegahan korupsi memerlukan institusi yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam praktik sehari-hari. Dalam konteks sekolah, nilai keadilan tidak lagi dipahami sebagai tujuan pembelajaran semata, tetapi menjadi pengalaman sosial yang membentuk integritas peserta didik serta memperkuat budaya antikorupsi secara berkelanjutan.

Implementasi Nilai Tanggung Jawab dalam Pembentukan Akuntabilitas Peserta Didik

Pembentukan nilai tanggung jawab di SMA Negeri 1 Takengon dipandang sebagai proses yang berlangsung melalui pemberian kepercayaan kepada peserta didik dalam menjalankan berbagai amanah di lingkungan sekolah. Kepala sekolah menekankan bahwa setiap bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada peserta didik merupakan sarana untuk membangun komitmen, kedisiplinan, dan integritas sejak dini. Perspektif tersebut diperkuat oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana yang menilai bahwa pembiasaan menjaga kebersihan kelas, merawat fasilitas sekolah, serta menggunakan sarana pembelajaran secara tertib merupakan bagian penting dari pendidikan karakter. Menurutnya, keterlibatan peserta didik dalam menjaga aset sekolah tidak hanya melatih kepedulian, tetapi juga membentuk kesadaran bahwa setiap amanah harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Pandangan serupa disampaikan oleh Guru Sejarah yang memandang bahwa tanggung jawab tidak cukup diajarkan sebagai konsep, melainkan perlu dihadirkan melalui pengalaman belajar yang memberi kesempatan kepada peserta didik mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkan hasilnya. Salah seorang guru menyampaikan, *"Setiap amanah yang diberikan kepada siswa harus dipertanggungjawabkan. Mereka tidak hanya belajar menyelesaikan tugas, tetapi juga belajar menjaga kepercayaan yang diberikan sekolah."* Dalam praktiknya, para guru secara konsisten melibatkan peserta didik dalam penyelesaian tugas individu maupun kelompok, pelaksanaan piket kelas, kepengurusan organisasi, dan

berbagai kegiatan sekolah lainnya sehingga mereka terbiasa menyelesaikan kewajiban sesuai peran yang diemban serta memahami konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil.

Pengalaman tersebut turut dirasakan oleh peserta didik. Mereka mengakui bahwa berbagai tanggung jawab yang diberikan guru mendorong mereka untuk lebih disiplin dalam menyelesaikan tugas dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Salah seorang peserta didik menyatakan, *"Kalau sudah diberi tanggung jawab, kami harus menyelesaikannya sampai selesai karena itu menjadi kepercayaan dari guru."* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses internalisasi tanggung jawab tidak hanya berlangsung melalui arahan guru, tetapi berkembang dari pengalaman nyata ketika peserta didik dipercaya mengelola tugas, menjalankan amanah, serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan dalam kehidupan sekolah. Pengalaman yang berulang tersebut pada akhirnya membentuk budaya akuntabilitas yang menjadi bagian dari karakter antikorupsi peserta didik.

Pengamatan selama penelitian memperlihatkan bahwa budaya tanggung jawab telah menjadi bagian dari kehidupan sekolah. Peserta didik tampak menjalankan piket kelas sesuai jadwal, menyelesaikan tugas pembelajaran tepat waktu, serta aktif melaksanakan berbagai program sekolah sesuai pembagian tugas yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut diperkuat oleh berbagai dokumen sekolah yang menunjukkan bahwa penguatan nilai tanggung jawab diintegrasikan ke dalam tata tertib, program pendidikan karakter, kegiatan organisasi siswa, serta sistem pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Keseluruhan temuan tersebut menggambarkan bahwa pembentukan tanggung jawab tidak berlangsung melalui pemberian instruksi semata, tetapi melalui pengalaman menjalankan amanah secara konsisten sehingga sikap akuntabel tumbuh sebagai bagian dari budaya sekolah.

Ketiga sumber data memperlihatkan adanya pola yang konsisten mengenai pembentukan nilai tanggung jawab di SMA Negeri 1 Takengon. Tanggung jawab tidak dipraktikkan sebagai kewajiban yang muncul ketika peserta didik menerima tugas tertentu, tetapi menjadi bagian dari kebiasaan yang melekat dalam berbagai aktivitas sekolah. Kesempatan untuk menerima amanah, menyelesaikan pekerjaan sesuai peran masing-masing, serta mempertanggungjawabkan hasilnya membentuk pengalaman belajar yang berlangsung secara berkesinambungan. Pola tersebut menunjukkan bahwa penguatan nilai tanggung jawab telah terintegrasi dalam kehidupan sekolah melalui berbagai aktivitas yang saling mendukung, sehingga peserta didik tidak hanya memahami pentingnya tanggung jawab, tetapi juga memperoleh ruang untuk mengimplementasikannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Pembentukan nilai tanggung jawab dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa pendidikan antikorupsi tidak hanya diarahkan pada penguasaan nilai moral, tetapi juga pada pembentukan akuntabilitas peserta didik melalui pengalaman menjalankan amanah. Kesempatan untuk memimpin kegiatan, menyelesaikan tugas kelompok, melaksanakan piket kelas, serta mengelola berbagai aktivitas organisasi memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Perspektif tersebut memperluas hasil penelitian Kirana & Siswantoro (2025) yang menempatkan keteladanan guru sebagai faktor utama dalam pendidikan antikorupsi. Pada konteks SMA Negeri 1 Takengon, keteladanan guru memang menjadi elemen penting, namun pembentukan tanggung jawab berlangsung lebih efektif ketika peserta didik memperoleh kepercayaan untuk menjalankan peran secara nyata. Temuan ini juga melengkapi penelitian Maulana dkk (2025), Syahfitri dkk (2025) yang menekankan pentingnya pembiasaan karakter sejak dini, karena proses pembiasaan tersebut tidak hanya membentuk kedisiplinan, tetapi juga mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diterima.

Perspektif tersebut memiliki keterkaitan dengan pandangan Thomas Lickona yang menempatkan karakter sebagai hasil integrasi antara pengetahuan moral, penghayatan moral, dan tindakan moral (Pranilinsyia dkk., 2025). Dalam penelitian ini, tanggung jawab tidak berhenti pada pemahaman mengenai kewajiban, tetapi berkembang menjadi tindakan nyata melalui berbagai aktivitas sekolah yang menuntut komitmen dan konsistensi. Proses tersebut juga memperkuat pandangan Lawrence Kohlberg bahwa perkembangan moral berlangsung ketika individu dihadapkan pada situasi yang menuntut pertimbangan etis dan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab (Fauziyah & Waningyun, 2026). Di sisi lain, hasil penelitian ini memperlihatkan perbedaan dengan Irfandi (2026) yang lebih menempatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai ruang utama pembentukan karakter antikorupsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai tanggung jawab tidak hanya berlangsung melalui pembelajaran formal, tetapi juga melalui pengalaman keseharian peserta didik ketika menjalankan berbagai amanah dalam kehidupan sekolah. Dengan demikian, pembentukan tanggung jawab lebih mencerminkan proses pembelajaran berbasis pengalaman daripada sekadar penyampaian materi di dalam kelas.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penjelasan mengenai mekanisme pembentukan tanggung jawab sebagai fondasi akuntabilitas dalam pendidikan antikorupsi. Sebagian besar penelitian terdahulu memosisikan tanggung jawab sebagai salah satu nilai karakter yang perlu ditanamkan melalui kurikulum, pembelajaran, atau keteladanan guru (Sitepu dkk., 2025; Nafsihi & Nasrowi, 2026; Wahyuni dkk., 2023)). Sebaliknya, penelitian ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab berkembang melalui keterhubungan antara pembelajaran, pemberian amanah, budaya sekolah, serta pengalaman mempertanggungjawabkan setiap tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Perspektif ini selaras dengan pemikiran Susan Rose-Ackerman yang menegaskan bahwa pencegahan korupsi memerlukan pembentukan budaya akuntabilitas sejak dini (Rambey, 2026). Dalam konteks sekolah, budaya tersebut dibangun bukan semata-mata melalui aturan formal, tetapi melalui kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengelola kepercayaan, menjalankan tanggung jawab, dan menerima konsekuensi atas setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian pendidikan karakter antikorupsi dengan menunjukkan bahwa akuntabilitas peserta didik tumbuh dari pengalaman sosial yang berulang dan terintegrasi dalam seluruh aktivitas sekolah, bukan hanya dari proses pembelajaran di kelas.

Implementasi Nilai Kesederhanaan dalam Pembentukan Pengendalian Diri Peserta Didik

Kesederhanaan dipahami oleh warga sekolah sebagai sikap yang tumbuh melalui pembiasaan dalam memanfaatkan berbagai sumber daya secara bijaksana, bukan sekadar sebagai aturan untuk membatasi perilaku peserta didik. Kepala sekolah menilai bahwa budaya hidup sederhana perlu dibangun melalui berbagai aktivitas sekolah sehingga peserta didik mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan tersebut diperkuat oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat yang menekankan bahwa berbagai kegiatan yang melibatkan kerja sama dengan masyarakat maupun orang tua selalu diarahkan untuk menumbuhkan kepedulian, sikap saling menghargai, dan penggunaan sumber daya secara proporsional. Menurutnya, pembiasaan tersebut membantu peserta didik memahami bahwa kesederhanaan merupakan bagian dari karakter yang harus diwujudkan baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam perspektif pembelajaran, Guru IPAS memandang kesederhanaan sebagai sikap yang dapat dikembangkan melalui pengalaman peserta didik dalam memanfaatkan lingkungan dan fasilitas belajar secara bertanggung jawab. Pembelajaran tidak hanya diarahkan untuk

meningkatkan pemahaman konseptual, tetapi juga membiasakan peserta didik menggunakan berbagai sumber belajar sesuai kebutuhan serta menjaga kelestarian fasilitas yang tersedia. Salah seorang guru menambahkan bahwa sekolah terus mendorong peserta didik untuk menghargai setiap fasilitas yang dimiliki karena sikap tersebut merupakan bagian dari pendidikan karakter yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembiasaan tersebut, peserta didik belajar bahwa penggunaan sumber daya secara bijaksana merupakan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan sekolah.

Pengalaman tersebut dirasakan secara langsung oleh peserta didik dalam berbagai aktivitas sekolah. Mereka mengungkapkan bahwa kebiasaan menggunakan perlengkapan belajar secara hemat, menjaga fasilitas bersama, serta tidak menunjukkan gaya hidup yang berlebihan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di sekolah. Salah seorang peserta didik menyampaikan bahwa kebiasaan tersebut membuat mereka lebih berhati-hati dalam menggunakan perlengkapan belajar maupun fasilitas sekolah karena semuanya dimanfaatkan secara bersama-sama. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa nilai kesederhanaan berkembang melalui praktik yang terus dilakukan sehingga membentuk cara berpikir dan bertindak peserta didik dalam menggunakan sumber daya secara proporsional, menghargai hak orang lain, serta mengendalikan keinginan yang berlebihan.

Gambaran tersebut semakin terlihat ketika peserta didik diberikan ruang untuk mengelola berbagai aktivitas sekolah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif. Para guru tidak hanya mengarahkan peserta didik agar hidup sederhana, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa setiap fasilitas sekolah merupakan amanah yang harus dijaga bersama. Seorang peserta didik mengungkapkan bahwa kebiasaan tersebut membuat mereka lebih berhati-hati dalam menggunakan perlengkapan belajar maupun fasilitas sekolah karena semuanya digunakan secara bersama-sama. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kesederhanaan berkembang melalui kebiasaan yang terus dipraktikkan sehingga menjadi bagian dari cara berpikir dan bertindak peserta didik dalam kehidupan sekolah.

Pengamatan selama penelitian memperlihatkan bahwa praktik kesederhanaan tidak berhenti pada penggunaan fasilitas sekolah, tetapi juga tercermin dalam pola interaksi antarpeserta didik yang tidak menonjolkan perbedaan kondisi ekonomi maupun kepemilikan pribadi. Budaya saling menghargai, menjaga fasilitas bersama, serta memanfaatkan berbagai sumber belajar sesuai kebutuhan diperkuat melalui berbagai program pendidikan karakter dan tata tertib sekolah yang terdokumentasi dengan baik. Keseluruhan kondisi tersebut memperlihatkan bahwa nilai kesederhanaan berkembang sebagai budaya sekolah yang mendorong peserta didik membangun pengendalian diri, rasa tanggung jawab terhadap fasilitas bersama, serta sikap menghargai apa yang dimiliki tanpa menunjukkan perilaku yang berlebihan.

Berbagai temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan nilai kesederhanaan berlangsung melalui proses pembiasaan yang terintegrasi dalam kehidupan sekolah. Kesederhanaan tidak diposisikan sebagai aturan yang membatasi perilaku peserta didik, tetapi berkembang sebagai pengalaman belajar yang membentuk cara mereka menggunakan sumber daya, berinteraksi dengan lingkungan, serta memahami pentingnya hidup secara proporsional. Dengan demikian, nilai kesederhanaan menjadi bagian dari budaya sekolah yang mendukung terbentuknya karakter antikorupsi melalui penguatan pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari.

Pembiasaan hidup sederhana yang berkembang di SMA Negeri 1 Takengon memperlihatkan bahwa pendidikan antikorupsi diarahkan untuk membangun kemampuan peserta didik dalam mengendalikan diri ketika berhadapan dengan berbagai pilihan dan

kepentingan. Kesederhanaan tidak dipraktikkan sebagai bentuk pembatasan terhadap peserta didik, melainkan sebagai cara membangun kesadaran agar mereka mampu menggunakan sumber daya secara proporsional, menghargai fasilitas bersama, dan menghindari perilaku yang berlebihan. Pola tersebut memperkuat pandangan Thomas Lickona bahwa karakter tidak terbentuk melalui penyampaian nilai semata, tetapi melalui kebiasaan yang dilakukan secara konsisten hingga menjadi bagian dari perilaku individu. Dalam konteks penelitian ini, pengalaman menggunakan fasilitas sekolah secara bertanggung jawab dan hidup sesuai kebutuhan menjadi media yang memungkinkan peserta didik menghayati makna kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Pandangan tersebut memiliki irisan dengan sejumlah penelitian sebelumnya, meskipun menunjukkan penekanan yang berbeda. Anwar (2021) menempatkan kesederhanaan sebagai salah satu nilai dasar dalam pendidikan antikorupsi yang perlu ditanamkan sejak dini, sedangkan Alfidyah (2025) menekankan pentingnya budaya sekolah dan keteladanan guru dalam membangun karakter antikorupsi. Hasil penelitian ini memperkuat kedua pandangan tersebut, namun memperlihatkan bahwa kesederhanaan memperoleh makna ketika peserta didik mengalami secara langsung praktik hidup proporsional dalam aktivitas sekolah. Dengan demikian, internalisasi nilai tidak berhenti pada pembelajaran di kelas maupun keteladanan guru, tetapi berkembang melalui pengalaman sosial yang terus diulang dalam penggunaan fasilitas bersama, pelaksanaan kegiatan sekolah, dan interaksi antarpeserta didik. Perspektif ini juga melengkapi temuan Permadani & Setiyono (2025) yang lebih menempatkan pembelajaran sebagai wahana utama pendidikan antikorupsi, karena penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan sekolah memiliki kontribusi yang sama pentingnya dalam membentuk karakter peserta didik.

Jika dicermati secara lebih mendalam, berbagai temuan penelitian mengisyaratkan bahwa kesederhanaan berperan sebagai mekanisme pengendalian diri yang menopang terbentuknya integritas peserta didik. Kemampuan membedakan antara kebutuhan dan keinginan, menggunakan fasilitas sesuai fungsi, serta menghargai sumber daya yang dimiliki bersama merupakan bentuk latihan moral yang berlangsung dalam aktivitas sehari-hari. Kebiasaan tersebut memiliki arti penting karena kecenderungan untuk bersikap berlebihan sering kali menjadi titik awal munculnya perilaku yang mengabaikan kepentingan bersama. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, pembentukan pengendalian diri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mencegah berkembangnya sikap oportunistik maupun penyalahgunaan kewenangan sejak usia sekolah.

Interpretasi tersebut menunjukkan bahwa nilai kesederhanaan memiliki hubungan yang erat dengan nilai-nilai antikorupsi lainnya yang berkembang di lingkungan sekolah. Kesederhanaan memperkuat kejujuran karena peserta didik dibiasakan untuk tidak mencari keuntungan secara berlebihan, mendukung tumbuhnya keadilan melalui penghargaan terhadap hak bersama, serta memperkuat tanggung jawab dalam memanfaatkan setiap amanah dan fasilitas yang tersedia (Fardani, 2026). Hubungan antarnilai tersebut memperlihatkan bahwa proses internalisasi pendidikan antikorupsi tidak berlangsung secara parsial, melainkan melalui keterpaduan berbagai nilai karakter yang saling menguatkan dalam kehidupan sekolah. Oleh karena itu, efektivitas pendidikan antikorupsi lebih ditentukan oleh kemampuan sekolah membangun budaya yang memungkinkan seluruh nilai tersebut dipraktikkan secara konsisten daripada sekadar menambahkan materi antikorupsi ke dalam proses pembelajaran.

Proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi yang berlangsung di SMA Negeri 1 Takengon memperlihatkan bahwa pembentukan integritas peserta didik tidak lahir dari satu bentuk intervensi pendidikan, melainkan tumbuh melalui keterpaduan berbagai pengalaman yang mereka alami selama berada di lingkungan sekolah. Kejujuran, keadilan, tanggung jawab,

kesederhanaan, dan keberanian berkembang secara bersamaan melalui interaksi dalam pembelajaran, pembiasaan, keteladanan guru, penerapan aturan sekolah, hingga berbagai kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkan tindakannya. Dalam proses tersebut, peserta didik tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai nilai-nilai antikorupsi, tetapi juga mengalami secara langsung bagaimana nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sekolah. Pengalaman yang terus berulang inilah yang menjadikan nilai-nilai antikorupsi bertransformasi dari sekadar pengetahuan menjadi bagian dari sikap dan perilaku yang membentuk integritas peserta didik.

Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pendidikan antikorupsi tidak cukup dijelaskan melalui efektivitas pembelajaran di kelas ataupun keteladanan guru semata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter antikorupsi berlangsung dalam suatu ekosistem pendidikan yang melibatkan budaya sekolah, tata kelola kelembagaan, hubungan sosial antarsesama warga sekolah, kesempatan belajar melalui pengalaman, serta dukungan keluarga dalam memperkuat nilai yang telah ditanamkan di sekolah. Perspektif ini memperluas pemahaman mengenai implementasi pendidikan antikorupsi yang selama ini lebih banyak dibahas dari sudut pandang kurikulum, strategi pembelajaran, atau program pendidikan karakter. Dengan demikian, penguatan integritas peserta didik memerlukan lingkungan pendidikan yang mampu menghadirkan pengalaman moral secara konsisten sehingga nilai-nilai antikorupsi tidak hanya dipahami sebagai materi pembelajaran, tetapi menjadi budaya yang hidup dalam keseharian warga sekolah.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan karakter di SMA Negeri 1 Takengon berlangsung secara terintegrasi melalui pembelajaran, budaya sekolah, keteladanan guru, tata kelola sekolah, serta pembiasaan yang memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik dalam mengembangkan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kesederhanaan, dan keberanian. Proses tersebut membentuk integritas peserta didik tidak hanya pada ranah pengetahuan, tetapi juga pada sikap dan perilaku yang tercermin dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa efektivitas pendidikan antikorupsi bergantung pada keterpaduan berbagai unsur dalam ekosistem pendidikan yang saling memperkuat, termasuk dukungan keluarga dalam menjaga konsistensi penerapan nilai di luar lingkungan sekolah. Oleh karena itu, penguatan pendidikan antikorupsi perlu dikembangkan melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan sehingga nilai-nilai antikorupsi tidak hanya dipahami sebagai materi pembelajaran, tetapi menjadi budaya yang hidup dalam seluruh aktivitas sekolah. Penelitian ini terbatas pada satu sekolah dengan pendekatan studi kasus sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada konteks sekolah yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan berbagai jenis sekolah dan menggunakan pendekatan komparatif atau mixed methods untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai

5. DAFTAR RUJUKAN

- Al Ghifari, M. H., Maniquez, J. C., & Subekti, M. A. (2026). Integration of Anti-Corruption Education into the Independence Curriculum in Schools: A Systematic Literature Review of Strategies, Challenges, and Implementation Effectiveness. *International Journal of Education and Social Research*, 4(2), 21–29. <https://doi.org/10.62017/ijesr.v4i2.163>

- Alfariz, F., & Permatasari, R. Y. A. (2026). Revitalisasi Moral Feeling Thomas Lickona melalui Estetika Musik Etnik: Sebuah Pendekatan Filsafat Pendidikan Berbasis Budaya: Thomas Lickona's Revitalization of Moral Feeling through Ethnic Music Aesthetics: A Culture-Based Educational Philosophy Approach. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 9(2), 354-361. <https://doi.org/10.23887/jfi.v9i2.93054>
- Al-farroz, I. N. I. (2026). Strategi Pencegahan Korupsi di Indonesia: Pendekatan Pendidikan, Transparansi, dan Partisipasi Publik. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(03). <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1091>
- Alfidyah, M. (2025). Kontribusi pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter anti-korupsi pada generasi muda. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 15-22.
- Annisa, A. N., & Ismail, M. S. (2024). Pendidikan karakter persepektif Thomas Lickona (Analisis nilai Islami dalam buku *Educating for Character*). *El-Madib: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 4(1), 102–115. <https://doi.org/10.51311/el-madib.v4i1.611>
- Anwar, C. (2021). Strategi pendidikan anti korupsi pada jenjang sekolah dasar. *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, 2(2), 195–202. <https://doi.org/10.21154/asanka.v2i2.2990>
- Balesta, P. S. (2025). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 2(2).
- Ernawati, E., Hamid, S., & Agustiani, A. (2025). Peran kepala sekolah dalam penerapan disiplin positif untuk mengelola perilaku dan pembiasaan di lingkungan sekolah. *Bosowa Journal of Education*, 6(1), 248–256. DOI: [10.35965/bje.v6i1.6084](https://doi.org/10.35965/bje.v6i1.6084)
- Fardani, D. N. (2026). *Nilai kejujuran dan pentingnya menuntut ilmu: Pilar kesuksesan hidup*. PT Traz Media Publishing.
- Fauziyah, U. M. R., & Waningyun, P. P. (2026). Dilema kewajiban dan kemanusiaan dalam konflik Suriah: Perkembangan moral tokoh Salamah dalam novel *As Long As the Lemon Trees Grow* karya Zoulfa Katouh perspektif Lawrence Kohlberg. *Jurnal Bastra (Bahasa dan Sastra)*, 11(2), 894–906.
- Gusnata, K. G., Setiawan, I. P. F., Gesella, N. M. M., Putri, N. P. D. C., & Nokoe, N. S. (2025). Pengaruh program pendidikan karakter anti korupsi terhadap sikap dan perilaku siswa SMA. *Jurnal Pena Edukasi*, 13(2). <https://doi.org/10.54314/jpe.v13i2.6017>
- Hadiamsyah, Y., & Nur, R. Y. (2026). Dilema objektivitas dan empati dalam observasi pengambilan keputusan penilaian akhir siswa di bawah standar (KKM). *IBTIDA'*, 7(1), 10–23. <https://doi.org/10.37850/ibtida.v7i1.1309>
- Hakim, D. Z. C., Amani, L. N., Fauzi, M. A. F., Dzaky, M., Mufidah, N. A., Anggara, R., & Mutmainah, S. H. (2026). Integrasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SDN Wadas III Karawang. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 12(2), 278–291. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v12i02.14893>
- Ibda, F. (2023). Perkembangan moral dalam pandangan Lawrence Kohlberg. *Intelektualita: Journal of Education Sciences and Teacher Training*, 12(1). <https://doi.org/10.22373/ji.v12i1.19256>

- Irfandi, I. (2026). Integrasi nilai toleransi, gotong royong, dan anti-korupsi dalam pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat ketahanan industri pada era Society 5.0. *Indo Green Journal*, 4(2), 273–286.
- Jariyah, L. S., Munawaroh, E. B., & Ma'rifani, M. (2025). Anti-Corruption Education in the Indonesian School and Social Context: An Integrative Review. *International Journal Universal Pedagogy Education*, 1(2), 181-192. <https://journal.tigaedukasiglobal.co.id/index.php/IJUPE/article/view/76>
- Kanafu, G., Punuf, M., Soinbala, S. A., & Panjaitan, R. (2026). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP OBJEKTIVITAS DALAM EVALUASI HASIL BELAJAR SISWA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(6).
- Khoiriyah, A. M. (2026). Budaya anti korupsi. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 4(4), 192-198.
- Kirana, O. C., & Siswantoro, M. I. (2025). Peran guru Pendidikan Pancasila dalam penanaman nilai antikorupsi untuk meningkatkan integritas murid. *Jurnal Pendidikan DEWANTARA: Media Komunikasi, Kreasi dan Inovasi Ilmiah Pendidikan*, 11(2), 157-164. <https://doi.org/10.55933/jpd.v11i2.908>
- Maulana, I., Haris, A., & Ihwan, I. (2025). PENGARUH PEMBIASAAN IBADAH TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER DISIPLIN ANAK DI MADRASAH IBTIDAIYAH KOTA BIMA: Pengaruh Pembiasaan Ibadah terhadap Pembentukan Karakter Disiplin Anak di Madrasah Ibtidaiyah Kota Bima. *eL-Muhbib jurnal pemikiran dan penelitian pendidikan dasar*, 9(1), 259-269. <https://doi.org/10.52266/el-muhbib.v9i1.4276>
- Nafsihi, W., & Nasrowi, B. M. (2026). Peran guru dalam menanamkan karakter tanggung jawab pada siswa sekolah dasar. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(6).
- Ningtyas, W. D., Kholida, N., Fatinah, N. D., & Fitriani, A. (2025). Implementasi nilai-nilai manajemen Islam dalam pembentukan perilaku organisasi dan kinerja karyawan. *MADDINA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 2(2), 252–276.
- Nurjanatin, R. (2026). Strategi efektif pendidikan anti korupsi dalam membentuk karakter integritas di sekolah dan perguruan tinggi. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 4(6), 404–409.
- Nurudin, Fauzi, M. A. N., & Barory, C. (2023). Pendidikan anti korupsi: Konsep pendidikan karakter dan tantangannya. *Educatus*, 2(1). <https://doi.org/10.69914/educatus.v2i1.8>
- Nurwahyuni, A., Najibah, H., & Maulani, I. (2026). Penguatan nilai kejujuran melalui pendidikan anti korupsi di SD Negeri Kotakulon 1 Bondowoso. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 4(4), 1229–1238. <https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.306>
- Permadani, D. K. A., & Setiyono, Y. (2025). Peran guru Pendidikan Pancasila sebagai agen perubahan dalam membentuk karakter antikorupsi siswa. *Jurnal Pendidikan DEWANTARA: Media Komunikasi, Kreasi dan Inovasi Ilmiah Pendidikan*, 11(2), 126-134. <https://doi.org/10.55933/jpd.v11i2.922>
- Pranilinsyia, A., Dlyi, E. S. R., & Ginting, R. F. (2025). Integrasi tasawuf dan psikologi moral dalam pendidikan Islam: Paradigma baru pembentukan karakter spiritual di era modern. *Mudabbir: Journal Research and Education Studies*, 5(2), 2835-2849. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1746>

- Pratama, D. F., & Siregar, R. S. Z. (2026). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Upaya Membangun Karakter Generasi Bangsa. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 1059-1062. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/1511>
- Rahma, V. P. N., Putri, Y. N., Hafiza, N., & Sari, O. P. (2025). Analisis Model Keteladanan Dan Penggunaan Bahasa Guru Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di SDN 024 Rambah Samo. *Jurnal Lazuardi*, 8(4), 155-165. <https://doi.org/10.53441/jl.Vol8.Iss4.296>
- Rambey, G. (2026). Korupsi Di Indonesia: Analisis Faktor Penyebab Dan Strategi Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 332-339. <https://doi.org/10.55357/is.v7i1.1339>
- Rohidussyafiq, M. (2026). Membangun Karakter Anti Korupsi melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 4(6), 2345–2352.
- Ruhadi, & Uddin, H. R. (2025). Corruption Prevention Strategy in Indonesia through Strengthening Character Education of Pancasila Ethics. *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, 5(2), 1734–1755. <https://doi.org/10.15294/lsr.v5i2.31711>
- Sakban, A., Budimansyah, D., Darmawan, C., & Syaifullah. (2025). Strengthening the Values of Honesty and Simplicity in Elementary School Children as Anti-Corruption Role Models. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 9(1). <https://doi.org/10.31004/obsesi.v9i1.6880>
- Salam, A. M. I., Prayetno, B., Usri, & Taufiq, M. S. (2024). Trends and Challenges of Character Education and Anti-Corruption Policy in Indonesia: A Review of the Sociology of Religion Literature. *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.35905/sosiologia.v3i1.10895>
- Santoso, R., Murdiono, M., Muhson, A., & Nadya, L. (2024). *The quality of anti-corruption education in Indonesian schools: Adaptation of the Servqual method*. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 13(4), 2482–2488. <https://doi.org/10.11591/ijere.v13i4.28150>
- Sitepu, F. B., Ndona, Y., & Saragi, D. (2025). Penanaman karakter tanggung jawab melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila: Studi deskriptif SDN 105313 Namo Rube Julu. *Jurnal BELAINDIKA: Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan*, 7(3), 507–515. <https://doi.org/10.52005/belaindika.v7i3.424>
- Suyitno, S., Retnasari, L., & Wardani, E. K. (2026). *Building systemic integrity: An analysis of learning materials and evaluations in anti-corruption education in elementary school*. *International Journal of Educational Management and Innovation*, 7(1), 84–95. <https://doi.org/10.12928/ijemi.v7i1.14717>
- Syahfitri, N. I., Salsabila, A., Alfariza, A., & Iqbal, M. (2025). Nilai-nilai pendidikan karakter dalam tradisi pesantren. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 2(2), 1033–1043. <https://doi.org/10.61253/b5dsp822>
- Tode, A., Rahmawati, D., Takdir, M., Mayasari, L. I., & Syam, A. R. (2025). Model pendidikan karakter di sekolah Katolik (2010–2025): Sebuah tinjauan *systematic literature review* berdasarkan kerangka Lickona. *Proceeding of Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas*

Negeri Jakarta, 3(1), 168–179. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/semnas-ps/article/view/63441>

Wahyuni, S., Erita, Y., & Fitria, Y. (2023). Implementasi pendidikan karakter tanggung jawab dalam pembelajaran Kurikulum Merdeka di SD Negeri 19 Silungkang. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(1), 1878–1888. <https://pdfs.semanticscholar.org/572b/aaf45185a35d61d38782fa43c78cdd1681fd.pdf>

Wahyuni, S., Wantu, S. M., & Kamuli, S. (2025). *Implementation of anti-corruption education in building student character at SMP Negeri 1 Kabila. International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 7(3). <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i3.8143>

Yusuf, M., Mutohar, P. M., & Fuadi, I. (2024). Aktualisasi nilai-nilai etik dalam membentuk efektifitas budaya organisasi lembaga pendidikan. *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 17–36. <https://doi.org/10.37348/aksi.v3i1.510>

Zulaiha, A. R., Hernawan, A. H., & Dewi, L. (2025). *The effect of anti-corruption character education on educational integrity. Inovasi Kurikulum*, 22(1), 133–146. <https://doi.org/10.17509/jik.v22i1.77126>